

Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang)

Ombi Romli

Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar

Email: ombiromli.fisip@unmabanten.ac.id

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Serentak di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten di tengah Pandemi Covid-19 diprediksi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19. Metode Penelitian menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19 ternyata mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pilkada Serentak, Pandemi Covid-19, Kabupaten pandeglang

Abstract. *Simultaneous Direct Local Head Election in Pandeglang Regency, Banten Province in the midst of the Covid-19 Pandemic is predicted to reduce public political participation of Pandeglang Regency in the simultaneous regional election during the Covid-19 Pandemic. This study aims to find out how political participation of the peoples of Pandeglang Regency in the simultaneous regional elections during Covid-19 Pandemic. The research method uses a mixed quantitative and qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and document studies. Based on the results research in Karang Tanjung District, Pandeglang Regency, public political participation in the simultaneous local elections during the Covid-19 pandemic turned out to have increased*

Keywords: *Political Participation, Simultaneous Elections, the Covid-19 Pandemic, Pandeglang Regency*

CARA MENGUTIP

Ombi, Romli. 2021.

Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang), Vol 1, No 2 (2021), 99-112.

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis Indonesia memiliki agenda politik rutin yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung serentak yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pada tahun 2020 Indonesia kembali menyelenggarakan Pilkada langsung serentak untuk memilih kepala daerah yang diikuti 270 daerah dengan rincian: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

Akan tetapi Pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020 terkendala karena adanya situasi Pandemi Corona Virus Disersea (Covid-19) yang mengancam keselamatan semua pihak. Dimana Pilkada serentak pasti akan menciptakan kerumunan yang dikhawatirkan akan semakin menyebarkan penularan Covid-19.

Dengan berbagai pertimbangan akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan tetap melaksanakan Pilkada langsung serentak dengan diterbitkannya kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pelaksanaan Pilkada langsung serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang berarti mundur dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 September 2020. Pilkada 9 Desember 2020 dilaksanakan dengan

ketentuan menggunakan protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2020.

Bagaimanapun pelaksanaan Pilkada langsung serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada langsung serentak sebelumnya karena adanya Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pelaksanaan Pilkada langsung serentak di tengah Pandemi Covid-19 akan membawa dampak pada kualitas Pilkada langsung serentak 2020 terutama akan menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam mengikuti Pilkada langsung serentak.

Secara sederhana partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. Huntington & Nelson (1976) berpendapat bahwa "By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making"¹. Yang bermakna bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah.

Back, H, Teorell, J., & Westholm, A (2011) mengemukakan ada setidaknya tiga cara masyarakat di negara demokratis dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

1. Masyarakat dapat terlibat dalam arena publik untuk mempromosikan dan menyampaikan tututannya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan
2. Masyarakat dapat menjadikan lembaga pembuat Undang-Undang (legislatif) atau lembaga eksekutif

¹Huntington, S.P. & Nelson, J.M., *No Easy Choice: Political Participation in Developing*

Countries, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1978)

sebagai target pesan politik yang ingin disampaikan, misalnya menandatangani petisi

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses seleksi dari orang-orang yang ingin menduduki jabatan politik. Contohnya dengan memberikan suara pada Pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik.²

Menurut Verba dan Nie, terdapat empat dimensi terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu:

1. Voting, yaitu melakukan pemungutan suara pada saat pemilihan umum. Memberikan suara di tempat pemungutan suara pada saat pemilihan umum (Pemilu) seringkali dinilai sebagai bentuk partisipasi politik yang paling nyata.
2. Campaign activity, yang mencakup kegiatan menjadi anggota atau bekerja untuk organisasi politik termasuk memberikan sumbangan kepada partai politik atau kelompok politik
3. Contacting, yaitu kegiatan untuk menghubungi pemimpin politik atau pejabat publik guna menyampaikan pesan politik atau menyampaikan masalah atau persoalan-persoalan berdimensi publik seperti masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Cooperative, atau kegiatan komunitas yaitu segala tindakan yang terkait dengan isu atau masalah komunitas lokal.³

Sementara itu Teorell, et al mengemukakan bahwa ada lima tipologi partisipasi politik yaitu:

1. Electoral participation, yaitu melakukan pemungutan suara termasuk memberikan suara pada saat pemilihan umum.
2. Consumer participation yang mencakup kegiatan memberikan sumbangan, melakukan boikot atau menandatangani petisi dan melakukan konsumsi politik, dengan kata lain consumer participation merupakan tindakan warga masyarakat sebagai konsumen politik yang kritis.
3. Party activity, yaitu tindakan menjadi anggota partai politik aktif partai politik, melakukan pekerjaan sukarela atau menyumbangkan uang untuk partai politik
4. Protest activity, yaitu tindakan mencakup tidaknya seperti turut serta dalam kegiatan demonstrasi, pemogokan, dan kegiatan unjuk rasa lainnya.
5. Contact activity, yaitu tindakan menghubungi organisasi pemerintah, politisi atau pejabat pemerintah⁴.

²Back, H. Teorell, J. & Westholm, A. "Explaining Modes of Participation: A Dynamic Test of Alternative Rational Choice Models" dalam *Scandinavian Political Studies* 34 (1), 2011, 74-97

³Verba S., Nie, NH., & Kim J.O, *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*, (Chicago: Chicago University Press, 1978)

⁴Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J.R, *Political Participation, Mapping the Terrain*. Dalam J. W. Deth., J.R. Montero & A. Westholm (Eds).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, meskipun mereka masing-masing memiliki pemikiran atau pandangan yang berbeda-beda dalam mendepinisikan partisipasi politik, tetapi ada satu hal yang sama mengenai bentuk partisipasi politik yang paling utama yaitu voting atau memberikan suara atau pilihan pada pemilihan umum.

Di Indonesia partisipasi politik masyarakat dalam bentuk voting yang lebih dikenal dengan melakukan pencoblosan memilih calon merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat penting dan menjadi indikator kualitas demokrasi. Sehingga pelaksanaan Pilkada langsung serentak di tengah Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar dalam menjaga kualitas demokrasi yang selama ini terjaga.

Salah satu tantangan terbesar Pilkada 9 Desember 2020 adalah menjaga kualitas demokrasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih pada masyarakat. Karena partisipasi terkait erat dengan legitimasi kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wakilkota) terpilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, makin tinggi pula legitimasi politiknya. Sebaliknya semakin rendah partisipasi politik semakin rendah pula legitimasinya.

Dengan dilaksanakannya Pilkada di tengah Pandemi Covid-19, kegiatan tahapan yang melibatkan kerumunan banyak orang (massa) terbatas. Imbasnya interaksi pasangan calon dengan masyarakat menjadi berkurang. Sebaliknya akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai program

kerja, platform serta visi misi para calon menjadi tidak maksimal. Kondisi inilah yang dikhawatirkan banyak pihak akan mengurangi daya tarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyalurkan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang melaksanakan Pilkada langsung serentak 2020. Dari 4 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten hanya kabupaten Pandeglang sebagai daerah pelaksana Pilkada serentak 9 Desember 2020 di wilayah Banten yang masih berstatus zona oranye Covid-19.⁵ Meskipun demikian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pandeglang tetap merasa khawatir akan meningkatnya penularan Covid-19 yang dkhawatirkan akan meningkatkan status Kabupaten Pandeglang menjadi zona merah

Pilkada langsung serentak 2020 Kabupaten Pandeglang diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu, pertama pasangan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban, dan kedua pasangan Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy.

Pasangan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban yang merupakan calon incumbent didukung oleh delapan partai politik yaitu: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan pasangan Thoni Pathoni Mukson dan Miftahul Tamamy

Citizenship and Involment in European Democracies: A Comparative Analysis., London and New York: Routledge, 2007.

⁵ CNN Indonesia Edisi 2 Desember 2020, 3 dari 4 daerah Pilkada Banten Zona Merah Covid-19

didukung oleh dua Partai Politik yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Pandeglang pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 dimasa pandemi *Covid-19* dengan mengambil tempat penelitian di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena⁶. Pengumpulan data melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peneliti menyaksikan masyarakat yang datang melakukan pencoblosan ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Karang Tanjung pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat pemilih yang sudah melakukan pencoblosan. Selain itu wawancara

dilakukan dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karang Tanjung, dan Pengamat Politik lokal di Kabupaten Pandeglang.

Studi dokumen dilakukan dengan membaca mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat dan terutama dokumen resmi hasil Pilkada serentak di KPU Kabupaten Pandeglang

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara induktif. Analisis data induktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam konteks penelitian ini hasil penelitian Partisipasi Politik di Kecamatan Karang Tanjung pada Pilkada di masa pendemi *Covid-19* akan memberikan gambaran secara umum partisipasi masyarakat dalam Pilkada di masa pandemic *Covid-19* di Kabupaten Pandeglang.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Karang Tanjung

Karang Tanjung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Pandeglang. Sebagai daerah yang terletak di Ibu Kota Kabupaten tentunya menjadi daerah yang sangat rentan dengan penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang luas wilayah Kecamatan Karang Tanjung 19,07 ha⁷.

⁶ Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.

⁷[https://pandeglangkab.bps.go.id/indicator/1/53/131/1/Luas Wilayah Menurut Kecamatan 2017](https://pandeglangkab.bps.go.id/indicator/1/53/131/1/Luas%20Wilayah%20Menurut%20Kecamatan%202017)

dengan jumlah penduduk 37.554 jiwa⁸. Adapun jumlah pemilih di Kecamatan Karang Tanjung sebanyak 24.000 pemilih yang tersebar di 4 kelurahan yaitu Kelurahan Juhut, Kelurahan Pagadungan, Kelurahan Cigadung, dan Kelurahan Kadu Merak. Kelurahan Juhut sebanyak 4866 DPT tersebar di 12 TPS, Kelurahan Pagadungan 5152 DPT tersebar di 12 TPS, Kelurahan Cigadung sebanyak 8604 DPT tersebar di 20 TPS, dan Kelurahan Kadu Merak 5406 DPT tersebar di 12 TPS.⁹

Proses Pemungutan Suara di Kecamatan Karang Tanjung

Berdasarkan observasi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung, proses pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease Covid-19*.

Penyelenggara Pilkada Serentak yang bertugas melaksanakan pemungutan suara yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan protokol kesehatan memakai masker, shield face, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dijaga ketat oleh

polisi yang berjumlah lima orang. KPPS juga menyediakan tempat mencuci tangan, handsantizer, dan masker bagi masyarakat yang datang untuk mencoblos di TPS.

Pada Saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal satu meter saat antri masuk ke lokasi TPS. Saat mendaftarkan diri ke petugas KPPS, pemilih menggunakan alat tulis masing-masing. Setelah mendaftar pemilih duduk ditempat yang sudah disediakan di kursi dengan jarak satu meter sambil menunggu panggilan.

Setelah dipanggil KPPS pemilih langsung menuju bilik suara di dalam ruangan dan melakukan pencoblosan surat suara. Setelah mencoblos pemilih diberikan tinta di jarinya sebagai tanda sudah memilih, kemudian mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu pemilih langsung pulang dan tidak diperbolehkan berada di area TPS untuk mencegah supaya tidak terjadi kerumunan¹⁰.

Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Karang Tanjung Meningkat

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 data penghitungan suara KPU Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 di Kecamatan Karang Tanjung, dari Jumlah Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 24.000 orang pada saat pemilihan yang

⁸<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/index.php/jumlah/jmlpenduduk> Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang

⁹Berdasarkan Data KPU Kabupaten Pandeglang tentang DPT dan Sebaran TPS Kecamatan Karang Tanjung 2020

¹⁰Observasi peneliti di TPS 9 Kelurahan Cigadung pada saat pencoblosan pada 9 Desember 2020

menggunakan hak pilih pada pemungkutan suara tanggal 9 Desember 2020 di masa Pandemi Covid-19 sebanyak 16.874 orang. Dengan demikian tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Karang Tanjung pada Pilkada Serentak Tahun 2020 sebesar

70,31%.¹¹

Berikut ini hasil hasil rapat Pleno penghitungan suara Pilkada serentak 2020 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Tanjung:

Rekapitulasi Data Pemilih
Hasil Pilkada Serentak Kabupaten Pandeglang Kecamatan Karang Tanjung
Tahun 2020

No.	Kelurahan	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Juhut	4866	3326	68,35
2.	Pagadungan	5152	3564	69,17
3.	Cigadung	8604	6242	72,54
4.	Kadu Merak	5406	3742	69,21
5.	Jumlah	24.000	16.874	70,31

Sumber: PPK Kecamatan Karang Tanjung

Sementara itu berdasarkan data KPU Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Pandeglang sebelumnya yaitu pada tahun 2015 di Kecamatan Karang Tanjung, jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 24.349 orang. Sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 15.975 orang. Dengan demikian tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Karang Tanjung pada Pilkada 2015 sebesar 65,61 % .¹²

Jika dibandingkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Karang Tanjung antara hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di

masa Pandemi Covid-19 yang jumlahnya sebesar 70,31%, dengan hasil Pilkada Serentak tahun 2015 sebesar 65,61%, maka partisipasi politik masyarakat Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 4,7%.

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang diluar dugaan mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan cenderung meningkat, dan proses Pilkada Serentak Tahun 2020 serba dibatasi.

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten

¹¹Berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan

Dalam Pemilihan BuPati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sabtu 12 Desember 2020

¹²<http://www.Pilkada2015.kpu.go.id/pandegl angkab Hasil Penghitungan Pilkada 2015>

Pandeglang Pada Pilkada Serentak 2020 ada faktor penyebabnya seperti yang tergambar dari hasil wawancara dengan para pemilih di TPS Kecamatan Karang Tanjung.

Berdasarkan wawancara terhadap lima orang pemilih yaitu Ihsan Helmi, di Kecamatan Karang Tanjung Kelurahan Cigadung TPS 11 Ihsan Helmi, Fauzian Zulfikar, dan H. Bambang, mereka secara umum menyatakan bahwa alasan ikut memilih di TPS Karang Tanjung karena sadar bahwa Pilkada itu penting dan mereka ingin menyalurkan aspirasinya dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.

Ketika ditanya apakah mereka tidak takut datang ke TPS karena suasana Pandemi Covid-19? Mereka menjawab tidak takut lagi karena Pandemi Covid-19 sudah lama terjadi. Fauzian Zulfikar menyatakan : “saya sudah terbiasa keluar rumah beraktivitas seperti biasa ketempat kerja, kerumah saudara, dan berbelanja dengan menerapkan protokol kesehatan”.

Sementara itu Helmi Ihsan menyatakan dia tidak takut pergi ke TPS untuk memilih disamping memang sudah terbiasa pergi ke ke luar rumah, dia juga percaya dengan menggunakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS akan aman dari bahaya penularan Covid-19. Saya melihat semua Panitia Penyelenggara Pilkada di TPS menyediakan sarana protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tempat cuci tangan, dan menjaga jarak.

H Bambang menyatakan alasannya

ikut mencoblos di TPS disamping karena tidak takut lagi dengan Covid-19 dan proses pencoblosan sudah menerapkan protokol kesehatan, menurutnya Pilkada kali ini lebih menarik karena diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah yang sebelumnya diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. “saya ingin ada perubahan makanya saya datang untuk memilih, dengan adanya dua pasangan calon kita akan segera tahu siapa pemenangnya¹³”

Menurut Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung H.Yusuf Hadi Boy bertambah pemilih dalam Pilkada disebabkan masyarakat karang tanjung yang biasanya tidak pulang ketika ada kegiatan Pilkada, seperti pelajar/mahasiswa, pegawai, pengusaha, karyawan yang berada di luar Kabupaten Pandeglang. Karena terjadinya pandemi Covid-19 mereka pulang dan ikut mencoblos dalam Pilkada 9 Desember 2020¹⁴.

Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Pandeglang Meningkat

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada Pilkada Pandeglang pada hari selasa tanal 15 Desember 2020 di Hotel Horizon Alatama Pandeglang oleh KPU Kabupaten Pandeglang, Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban.

Dari 35 Kecamatan dari total 2.243 TPS yang tersebar di 339 desa/kelurahan, Pasanan calon Bupati dan Wakil Bupati Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban memperoleh

¹³Wawancara dengan masyarakat setelah pencoblosan di TPS 9 Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung pada 9 Desember 2020

¹⁴Hasil Wawancara Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung 12 Desember 2020

389.367 suara. Sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy memperoleh 223.220 suara.¹⁵

Seperti halnya di Kecamatan Karang Tanjung dimana pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 partisipasi politik masyarakatnya mengalami peningkatan, secara keseluruhan di setiap Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Pada

Pilkada Serentak 2020 tingkat partisipasi politik masyarakatnya menunjukkan adanya peningkatan pula.

Berikut ini data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang dan Realisasi Pencapaian Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 sebagai berikut :

Realisasi Pencapaian Tingkat Partisiapsi Masyarakat
Pilkada Serentak Kabupaten Pandeglang per Kecamatan
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Angsana	21.053	14.148	67,20
2.	Banjar	24.895	16.628	66,79
3.	Bojong	26.079	17.623	67,58
4.	Cadasari	24.667	17.248	69,92
5.	Carita	25962	18.801	72,08
6.	Cibaliung	21451	15247	71,08
7.	Cibitung	16.555	12.627	76,27
8.	Cigeulis	27.411	19.075	69,59
9.	Cikedal	24.553	18.220	74,21
10.	Cikeusik	39.288	27.747	70,62
11.	Cimanggu	27.477	20.572	74,87
12.	Cimanuk	29.024	19.204	66,17
13.	Cipeucang	21.694	14.324	66,03
14.	Cisata	18.952	13.679	72,18
15.	Jiput	25.677	18.788	73,17
16.	Kaduhejo	28.845	18.814	65,22

¹⁵Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Selasa 15 Desember 2020

17.	Karangtanjung	24.000	16.874	70,31
18.	Koroncong	15.142	10.731	70,87
19.	Labuan	39.467	28.792	72,95
20.	Majasari	34.649	26,386	68,76
21.	Mandalawangi	39.768	26386	66,35
22.	Mekarjaya	16.783	9901	58,99
23.	Menes	28.129	19.402	68.98
24.	Munjul	19.446	13.209	67,93
25.	Pagelaran	27.700	20.382	73,58
26.	Pandeglang	28.747	21.421	74,52
27.	Panimbang	36.235	25.264	69,72
28.	Patia	21.941	14.381	65,54
29.	Picung	27.989	18.679	66,74
30.	Pulosari	23.612	16.238	68,77
31.	Saketi	33,543	23.364	69,65
32.	Sindangresmi	18.058	12.308	68,16
33.	Sobang	27.983	18.539	66,25
34.	Sukaresmi	26.215	17.404	66,39
35	Sumur	18.214	13.132	72,10
	Jumlah	911.204	632.977	69,47

Sumber: KPU Pandeglang

Data di atas menunjukkan bahwa dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pandeglang pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berjumlah 911.204 orang, sedangkan masyarakat yang menggunakan hak pilih berjumlah 632.997 orang. Dengan demikian pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 69,47 persen¹⁶.

Apabila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 960.675, dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih sebanyak 545.914 orang, dengan tingkat

¹⁶Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Selasa 15 Desember 2020

partisipasi sebesar 56,85 persen¹⁷. Dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi *Covid-19* mengalami peningkatan sebesar 12,62 persen.

Menurut Samsuri, anggota Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menuturkan : "KPU Pandeglang menargetkan partisipasi politik dalam Pilkada serentak tahun 2020 sebesar 75%. Sebenarnya kami sendiri di KPU Kabupaten Pandeglang merasa pesimis target itu akan tercapai bahkan mungkin akan lebih menurun tingkat partisipasinya dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 karena adanya Pandemi *Covid-19*. Ditambah lagi menjelang hari pencoblosan cuaca yang tidak bersahabat dimana curah hujan menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 sangat tinggi yang itu akan mengurangi minat masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos"¹⁸.

Tetapi diluar prediksi ternyata Partisipasi masyarakat Pada Pilkada Pandeglang 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada tahun 2015. Masyarakat bergitu antusias mengikuti Pilkada meskipun di tengah Pandemi *Covid-19*. Keadaan ini terjadi karena banyaknya masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang berdomisili di luar Pandeglang seperti Jakarta, Tangerang, dan Bandung yang biasanya tidak memilih, seperti pekerja/karyawan, pedagang, dan mahasiswa karena sedang terjadi *Covid-19*

mereka pulang kampung ikut melakukan pencoblosan¹⁹.

Karena Pandemi *Covid-19* para pedagang tidak dapat berdagang mereka akhirnya pulang, para pekerja karena tempat kerjanya tutup/diliburkan/bangkrut mereka pulang dan mahasiswa kampusnya tutup perkuliahan dilakukan secara daring juga akhirnya pada pulang ke kampung masing-masing. Di kampung karena tidak ada kegiatan akhirnya mereka ikut berpartisipasi dengan mencoblos di TPS pada Pilkada serentak 2020.

Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Partisipasi Politik

Salah satu isu yang mengemuka dan menjadi tantangan besar Pilkada di tengah Pandemi *Covid-19*, termasuk di Kabupaten Pandeglang adalah akan menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada langsung serentak 2020. Hal ini tidak lepas dari akan terjadinya kerumunan masyarakat sebagai implikasi dari kegiatan Pilkada langsung serentak yang dapat mengakibatkan penularan *Covid-19*. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik masyarakat untuk berpartisipasi menyalurkan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di masa Pandemi *Covid-19* kegiatan proses Pilkada juga serba dibatasi untuk menghindari terjadinya kerumunan seperti kegiatan sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada. Kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh

¹⁷<http://www.Pilkada2015.kpu.go.id/pandeglang> angkab Hasil Penghitungan Pilkada 2015

¹⁸Wawancara dengan Samsuri anggota Komisiner KPU Kabupaten Pandeglang pada 7 Maret 2021

¹⁹Wawancara dengan Samsuri anggota Komisiner KPU Kabupaten Pandeglang pada 7 Maret 2021

calon kepala daerah yang biasanya dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan massa yang banyak, pada Pilkada kali ini tidak dapat dilaksanakan. Dampaknya interaksi langsung pasangan calon kepala daerah dengan masyarakat menjadi berkurang.

Masyarakat Kabupaten Pandeglang lebih banyak mendapatkan informasi mengenai visi misi dan program kerja pasangan calon kepala daerah melalui media massa, media sosial, dan televisi. Sehingga visi dan misi dan program kerja sebagai materi kampanye pasangan calon kepala daerah tidak tersampaikan secara maksimal seperti pada Pilkada serentak sebelumnya.

Meskipun dalam suasana Pandemi Covid-19 dimana masyarakat dibayangi ketakutan tertular Covid-19, dan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak seperti sosialisasi Pilkada dan kampanye politik yang serba dibatasi, ternyata Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang partisipasi masyarakatnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pilkada serentak tahun 2015.

Keadaan ini diluar prediksi banyak pihak yang menganggap Pilkada Serentak di Kabupaten Pandeglang tahun 2020 partisipasinya akan mengalami penurunan karena diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para informan ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya partisipasi politik Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pandelang yaitu sebagai berikut:

Pertama, masyarakat Kecamatan Karang Tanjung tidak merasa takut lagi

tertular Covid-19. Pandemi Covid-19 yang sudah lama terjadi menyebabkan masyarakat Kabupaten Pandeglang sudah terbiasa dengan suasana pandemi Covid-19 sehingga masyarakat tidak merasa takut lagi untuk beraktivitas di luar rumah termasuk mengikuti pencoblosan pada Pilkada serentak 2020.

Kedua, adanya kebijakan penyelenggara Pemilu dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam melaksanakan pemungutan suara pada Pilkada Serentak dengan menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini menyebabkan masyarakat percaya bahwa mengikuti pencoblosan dalam Pilkada di tempat pemungutan suara aman dari penularan Covid-19

Ketiga, Banyak masyarakat Kabupaten banyak yang pulang dari luar kota Pandeglang ketika terjadi Pandemi Covid-19. Kelompok masyarakat seperti para pekerja atau karyawan, pedagang, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar tempat domisili yang biasanya tidak ikut mencoblos pada pemungutan suara dalam Pilkada, karena sedang Pandemi Covid-19 mereka pulang sehingga dapat ikut mencoblos pada Pilkada Serentak 2020.

Keempat, Pilkada di Kabupaten Pandeglang diikuti oleh dua pasangan calon. Pilkada yang diikuti oleh dua pasangan calon cenderung lebih menarik untuk diikuti oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan Pilkada yang diikuti oleh banyak pasangan calon (lebih dari dua pasangan calon).

Menurut Muhammad Jafar, pengamat Politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya Kabupaten Pandeglang, dengan meningkatnya

partisipasi politik pada Pilkada Serentak tahun 2020 lebih memberikan legitimasi yang kuat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Pandeglang kedepan. Bupati dan Wakil Bupati akan semakin leluasa dalam membuat program kerja dan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Diharapkan dengan dengan legitimasi politik ini akan berdampak pada peningkatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang menjadi semakin maju dan masyarakatnya yang lebih sejahtera.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang Pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kecamatan Karang Tanjung menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,7 persen. Angka peningkatan itu diperoleh berdasarkan perbandingan penghitungan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Karang Tanjung pada Pilkada Serentak 2020 yang mencapai 70,31 persen, dengan Pilkada Serentak tahun 2015 hanya mencapai 65,61 persen.

Sama halnya dengan Kecamatan Karang Tanjung, Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 13 persen. Peningkatan ini terlihat dari jumlah persentase pemilih di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 69%. Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya tahun 2015 dengan tingkat

partisipasi 56%.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh masyarakat yang merasa tidak takut lagi dengan Covid-19, penyelenggaraan pemungutan suara dengan menggunakan protokol kesehatan, adanya penambahan jumlah pemilih dari masyarakat Pandeglang yang biasanya tidak memilih seperti pekerja/karyawan, pedagang, mahasiswa/pelajar yang berada di luar Kabupaten Pandeglang, dan Pilkada di Kabupaten Pandeglang diikuti oleh dua pasangan calon yang cenderung lebih menarik untuk diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Back, H, Teorell, J., & Westholm, A. 2011. Explaining Modes of participation: A dynamic test of alternative rational choice models. *Scandinavian Political Studies* 34 (1).
- Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sabtu 12 Desember 2020
- Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Selasa 15 Desember 2020
- CNN Indonesia Edisi 2 Desember 2020, 3 dari 4 daerah Pilkada Banten Zona Merah Covid-19

²⁰Wawancara dengan Moh Jafar Akademisi STISIP Banten Raya 15 Desember 2020

Huntington, S.P. & Nelson, J.M. 1978. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge Mass: Harvard University Press

Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J.R (2007), *Political Participation, Mapping the Terrain*. Dalam J.W.Deth., J.R. Montero & A. Westholm (Eds). *Citizenship and Involment in European Democracies: A Comparative Analysis*, London and New York:Routledge

Verb S., Nie, NH.,&Kim J.O (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*, Chicago: Chicago University Press

Internet

<http://www.Pilkada2015.kpu.go.id/pandeglangkab> Hasil Penghitungan Pilkada 2015

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/index.php/jumlah/jmlpenduduk> Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang

<https://pandeglangkab.bps.go.id/indicator/153/131/1/LuasWilayahMenurutKecamatan2017>

Nazir, Moh, 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)